



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD SOHIBUL IMAN
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 94202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.734.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m²/150 m² di KAB / KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 397 m² di KAB / KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 794.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/120 m² di KAB / KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
4. Tanah Seluas 1.688 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 1.415 m² di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 921.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI DELICA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000



3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.655.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.655.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.